



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Turoyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2011

Rembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag. NIP 196006201089032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Turoyah telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201089032001

Sekretaris,

NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag NIP. 196803091996031002 Penguji II,

Mugiyati, MEI

NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201089032001

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.

A. Faishal Haq, M.Ag

P:/195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SITI TUROYAH

Nim

: C51207050

Semester: VIIII

Jurusan

: Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN SYT'AH IMAMIYAH MENURUT PANDANGAN ASATIZ YAPI (YAYASAN PESANTREN ISLAM) BANGIL" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

> Penulis Siti Turoyah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: "Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah menurut Pandangan Asātiż YAPI Bangil" adalah hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah? Kedua, apa rujukan hukum yang digunakan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah? Ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan asātiż YAPI Bangil. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif dan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa asātīz YAPI Bangil memandang kedudukan saksi dalam pernikahan bukan suatu kewajiban, melainkan sunah. Jadi, menurut mereka saksi bukan menjadi syarat sah akad nikah. Rujukan hukum yang digunakan oleh asātīz YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Khamayniy yang termaktub dalam kitab Taḥrīr al-Wasīlah. Pandangan asātīz YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan tidak sejalan dengan hukum Islam karena ditemukan beberapa hadis yang menerangkan keharusan hadirnya saksi dalam pernikahan. Terlepas dari pandangan mereka tersebut, dalam prakteknya mereka tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam akad pernikahan yang mereka langsungkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada para penganut mazhab Syī'ah Imāmiyah, seyogianya tetap menghadirkan dua saksi dalam pernikahan meskipun bagi mereka saksi bukan syarat sah pernikahan. Mengingat banyaknya hikmah yang terdapat dalam menyaksikan akad nikah. Bagi pembaca diharapkan tidak meremehkan masalah saksi dalam pernikahan, sebab persaksian ini telah diatur dalam hukum Islam (baca: hadis). Di Indonesia pun masalah saksi dalam pernikahan diatur secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT ISLAM	20
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan	20
	B. Syarat-Syarat Saksi	24
	C. Pendapat Ulama tentang Saksi dalam Pernikahan	33
	D. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah	35
BAB III	PANDANGAN <i>ASĀTIŻ</i> YAPI BANGIL TENTANG SAKSI DAL	.AM
	PERNIKAHAN <i>SYT'AH IMĀMIYAH</i>	38
	A. Saksi dalam Pernikahan menurut Syi'ah Imāmiyah	38
	1. Sekilas tentang Syi'ah Imāmiyah	38
	2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum <i>Syīʻah Imāmiyah</i>	42
	3. Pendapat Syī'ah Imāmiyah tentang Saksi dalam	
	Pernikahan	45
	B. Pandangan Asātiż YAPI Bangil tentang Saksi dalam	
	Pernikahan Syī'ah Imāmiyah	50
	1. Profil YAPI Bangil	50
	2. Sekilas tentang Pernikahan Syī'ah Imāmiyah di	
	YAPI Bangil	51
	3. Penggunaan Rujukan Hukum oleh Asātiż YAPI	
	Bangil tentang saksi dalam Pernikahan Syi'ah	
	Imāmiyah	53

	4. Pandangan Asātiż YAPI Bangil tentang Saksi dalam	
	Pernikahan Syi'ah Imāmiyah	54
	5. Pelaksanaan Kesaksian dalam Pernikahan Syi'ah	
	Imāmiyah	57
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM	
	PERNIKAHAN SYT'AH IMĀMIYAH MENURUT	
	PANDANGAN ASĀTIŻ YAPI BANGIL	58
	A. Analisis terhadap Pandangan Asātiż YAPI Bangil	
	tentang saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah	58
	B. Analisis terhadap Rujukan Hukum Asātiż YAPI Bangil	
	tentang Saksi Pernikahan Syli'ah Imamiyah	65
	C. Analisis terhadap Pelaksanaan kedudukan Saksi dalam	
	Pernikahan Asātiż YAPI Bangil	68
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
DAFTAR P	USTAKA	75
LAMPIRA	N	

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
١	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	Ha	þ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titih di bawah)
ض ط	Dad	ġ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	6	Koma terbalik (di atas)
<u>ع</u> غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
<u>ا</u> ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

	Ha	H	На
ç	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

- 2. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya arba'ah.
 - b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Tirmiżi.
 - c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya jumhūr.
- 3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya syawkāniy.
 - b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya zuhayliy.
- 4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *syī'ah* dan *imāmiyah*.
- 5. Syaddah atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *sunnah*.
- 6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-wuṣqā*.
- 7. Ta Marbūṭah mati atau yang dibaca seperti yang berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan tā' marbūṭah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya kifāyah al-akhyār atau kifāyatul akhyār.
- 8. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya fuqahā'. Sedangkan di awal kata huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya Ibrāhīm.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan masalah yang penting, karena pernikahan merupakan kebutuhan dasar (basic need). Sebagaimana diketahui, pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan cara yang Allah SWT pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Manusia secara fitrah atau *nature* diciptakan Tuhan dalam dirinya, mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, di antaranya kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur dalam hidup berkeluarga.² Hal ini dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.³

¹ H. Miftahul Huda, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri", *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam*, No. 4, (Juli, 2009), 1.

² Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan, 1998), 434.

³ Ali Yusuf as-Subki, *Niṣāmul Usrah fi al-Islām*, (Penerjemah: Nur Khazin, *Fiqh Keluarga*), (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..." (Q.S. an-Nisā': 1) 4

Meski demikian, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang menyalurkan nalurinya dengan bebas, menuruti hawa nafsu dengan sesuka hati dan mengikuti ajakan setan sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang merusak dan menimbulkan dosa-dosa. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan kehormatan dan martabat tersebut. Dalam arti lain hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam sebuah ikatan pernikahan.

Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةً عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ (مَنِ اسْتَطَاعَ ٱلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ (مَنِ اسْتَطَاعَ ٱلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ وَصِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ (مَنِ اسْتَطَاعَ ٱلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ وَمَنْ أَلُهُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً) 5

⁴ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 77.

⁵ Al-Bukhāri, Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'il, ṢaḥĪḥ Al-Bukhāri, Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2000), 228-229.

Artinya: "'Abdan menceritakan kepada kami, dari Abi Hamzah dari Al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika saya berjalan bersama 'Abdillah RA maka ia berkata: Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena nikah itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa merupakan penawar."

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi yang hendaknya diteladani umatnya. Pernikahan akan memiliki peran yang penting jika masing-masing pasangan melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa raḥmah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Islam mengatur secara jelas mengenai masalah pernikahan. Termasuk di dalamnya adalah masalah saksi. Rukun dan syarat-syarat pernikahan wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tidak sah. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Arba'ah bahwa "Nikah fāsid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak

⁶ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, 406.

memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil sama yaitu tidak sah" ⁷

Jumhūr ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:8

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Akad nikah tidaklah sah kecuali dihadiri oleh wali dan dua saksi yang adil. Artinya, apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahannya tidak sah. Namun, Quraish Shihab memberikan komentar dalam masalah saksi bahwa menurutnya tidak menemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya. D

Jumhūr ulama berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dihadiri saksisaksi tidak sah. Jika ketika ijab *qabūl* tidak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, maka pernikahannya

⁷ Abdurrahman al-Jazīrī, Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 106.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 46-47.

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Ḥusaini, Kifayah al-Akhyar, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),41.

¹⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2007), 270.



tidak sah.¹¹ Jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka perkawinannya tetap sah.¹² Hal ini menunjukkan bahwa saksi dalam pernikahan sangat menentukan sah dan tidaknya suatu penikahan.

Dalil yang mereka gunakan di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّنَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ جَايِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ٱلْبَعَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. 13

Artinya: "Yūsuf bin Hammād Al-Ma'niy Al-Baṣriy menceritakan kepada kami, 'Abdul A'lā menceritakan kepada kami dari Sa'īd dari Qatādah dari Jābir bin Zaid dari Ibnu 'Abbās sesungguhnya Nabi SAW bersabda: pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi."

Kedua: Dari 'Āisyah, Rasulullah SAW bersabda:

نَا أَبُوْ ذَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْن بْن عِبَاد النَّسَائِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بْن سِنَان نَا أَبِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. 14

Artinya: "Abū Żar Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakr menceritakan kepada kami, Aḥmad bin Al-Husain bin 'Ibād an-Nasāiy menceritakan, Muhammad bin Yazīd bin Sinān menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āisyah

¹¹ Sayyid Sābiq, Figh as-Sunnah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 480.

¹² M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 8.

¹³ Imam at-Tirmiżi, Sunan at-Tirmiżi, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 354.

¹⁴ Ali bin Umar ad-Dār Quṭni, Sunan ad-Dār Quṭni, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 138.

berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Namun sebaliknya, berbeda dengan pendapat jumhūr ulama yaitu Syī'ah Imāmiyah. Syī'ah Imāmiyah berpendapat bahwa pernikahan tanpa saksi hukumnya sah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam buku Fiqih Lima Mazhab bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah istiḥbāb, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban. Mereka menyatakan, tidak ada naṣ al-Qur'an tentang kewajiban persaksian dalam pernikahan, sementara hadishadis di atas dinilai tidak kuat oleh mereka. Mereka menyatakan, tidak ada

Dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* yang ditulis oleh Imam Khamayniy disebutkan bahwa menyaksikan akad nikah hukumnya *sunnah*. ¹⁷ Hal ini juga diperkuat dengan hadis yang terdapat dalam kitab *al-Kāfī* sebagai berikut:

عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ زَرَارَةَ بْنِ أَعْيُن قَالَ : سُفِلَ أَبُوْعَبْدِاللهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُؤَاةَ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِتَرْوِيْجِ الْبَتَّة فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُوْدُ فِيْ تَرْوِيْجِ الْبَتَّة مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. 18

Artinya: "Ali bin Ibrāhim dari Ibnu Abī 'Umayr, dari Umar bin Użaynah, dari Zarārah bin A'yun berkata: Abū 'Abdillāh AS ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa saksi, kemudian beliau menjawab: sama sekali tidak apa-apa menikah yang demikian, hal itu

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'Ala Mażahib al-Khamsah, (Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Mażhab), (Jakarta: Lentera, 2010), 314.

¹⁶ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 69.

¹⁷ As-Sayyid al-Khamayniy, *Tahrir al-Wasilah*, Juz 2, t.p, t.t., 238.

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq al-Kulaini ar-Rāzi, al-Kāfi, Juz 5, t.t., 387.

merupakan urusan antara dia dan Allah. Sesungguhnya saksi dalam pernikahan itu diperlukan untuk kepentingan anak, jikalau tidak ada maka tidak apa-apa."

Namun alasan tersebut, selain bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, juga tidak sesuai dengan kepentingan pernikahan itu sendiri, terutama dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat sekarang. Yaitu dengan makin berkembangnya jumlah penduduk sehingga sulit diketahui manakah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung dengan nikah, dan mana yang tidak. Sehingga akan sangat mudah bagi orang-orang yang tidak beritikad baik, untuk mengklaim telah terjadinya akad nikah -walaupun tanpa saksi- apabila diketahui mereka telah hidup bersama.¹⁹

Berkaitan dengan betapa pentingnya saksi dalam pernikahan, setidaknya ada tiga pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum pernikahan yang mengatur masalah saksi nikah. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.

¹⁹ Muhammad Bagir al-Habsyi, Fiqih Praktis, 69.

²⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: 2001), 23.

Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Sebagaimana pemaparan di atas, kedudukan saksi dalam pernikahan menurut $Sy\bar{i}'ah$ $Im\bar{a}miyah$ bukanlah menjadi kewajiban. Hanya saja jika menggunakan saksi dalam pernikahan merupakan anjuran yang tentunya tidak mencapai pada tataran wajib. Di YAPI Bangil ada beberapa $ust\bar{a}\dot{z}$ yang bermazhab $Sy\bar{i}'ah$ $Im\bar{a}miyah$. Sebagai orang $Sy\bar{i}'ah$ $Im\bar{a}miyah$, mereka berpandangan kalau saksi dalam akad nikah hanya sebuah anjuran. Namun, dalam pelaksanaan ketika dilangsungkan sebuah pernikahan mereka tetap menggunakan saksi dengan alasan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah khususnya dalam masalah pernikahan. Pandangan yang dimiliki $as\bar{a}ti\dot{z}$ tersebut berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Apalagi dalam kenyataannya mereka justru tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam pernikahan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pandangan asātiz tentang saksi pernikahan Syī'ah Imāmiyah serta pelaksanaannya di YAPI Bangil yang dituangkan dalam judul "Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah menurut Pandangan Asātiz YAPI Bangil."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah:

- 1. Pendapat jumhur ulama tentang saksi dalam pernikahan
- 2. Kedudukan saksi dalam pernikahan menurut Syi'ah Imāmiyah
- 3. Pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah
- 4. Rujukan hukum *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*
- 5. Kedudukan saksi dalam pelaksanaan pernikahan di YAPI Bangil
- 6. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek keberadaan saksi dalam pernikahan di YAPI Bangil
- 7. Analisis hukum Islam terhadap saksi pernikahan Syi'ah Imamiyah
- 8. Analisis terhadap pandangan asātiż YAPI Bangil tentang keberadaan saksi dalam pernikahan menurut Syī'ah Imāmiyah

Dari beberapa masalah yang telah peneliti identifikasi, untuk memudahkan pembahasan yang akan diteliti maka peneliti membatasi masalah tersebut yaitu:

Pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah
 Imāmiyah

- Rujukan hukum yang digunakan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah
- Analisis terhadap pandangan asātiż di YAPI Bangil tentang saksi pernikahan
 Syī'ah Imāmiyah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah?
- Apa rujukan hukum yang digunakan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah?
- 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah?

D. Kajian Pustaka

Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemikiran *Syī'ah Imāmiyah* atau pun saksi dalam pernikahan, di antaranya:

- 1. Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Az-Zāhiri). Skripsi dengan nomor panggil S-2009016-AS ini ditulis oleh Mashudianto mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menyimpulkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab Az-Zāhiri, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Masing-masing dari dua pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang mereka gunakan secara tekstual, tanpa menggunakan tafsiran akal, juga mengenyahkan qiyās dan ijmā'. Metode tekstual pada mazhab Az-Zāhiri ini memiliki kekuatan, yaitu terjaganya fatwa-fatwa mereka dari aturan-aturan syar'iyah. Namun kelemahannya sulit sekali memecahkan masalah baru yang tidak ada teksnya di dalam al-Our'an,
- 2. Studi Analisis Pendapat Ibnu Munżir tentang Nikah tanpa Saksi.²² Skripsi ini ditulis oleh Fatkhudin, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang membahas pendapat Ibnu Munżir yang tertuang dalam kitab al-Isyrāf 'alā Mażāhib Ahli al-'Ilmi. Menurutnya tidak ada ketetapan dari nabi tentang adanya dua orang saksi dalam pernikahan sehingga saksi bukan merupakan syarat sah pernikahan, maka nikah tanpa saksi hukumnya sah.
- 3. Skripsi yang ditulis oleh Sugiono yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Syī'ah Imāmiyah dan Imam Syāfi'i tentang Wasiat Terhadap Ahli

²¹ Mashudianto, *Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mażhab Az-Zāhiri)*, Skripsi tahun 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya

²² Fatkhudin, Studi Analisis Pendapat Ibnu Munżir tentang Nikah tanpa Saksi, Skripsi tahun 2008, IAIN Walisongo Semarang

Waris''.²³ Penelitian ini fokus pembahasannya adalah menjawab pertanyaan:
Bagaimana pemikiran dan *istinbāṭ* hukum *Syī'ah Imāmiyah* dan Imam Syāfi'i tentang wasiat terhadap ahli waris, sehingga diketahui perbedaan dan persamaan kedua pemikiran tersebut tentang wasiat terhadap ahli waris.

Dari karya tulis ilmiah tersebut dan fokus kajian yang diangkat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi pernikahan Syī'ah Imāmiyah, rujukan hukum yang digunakan serta analisisnya.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang pemikiran Syī'ah Imāmiyah dan saksi dalam pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya, namun penelitian yang penulis angkat dengan judul "Analisis Hukum Islam tentang Saksi Pernikahan Syī'ah Imāmiyah dalam Pandangan Asātiz di YAPI Bangil" belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

²³ Sugiono, Studi Komparatif Pemikiran Syi'ah Imamiyah dan Imam Syāfi'i tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris, Skripsi tahun 2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya

- Memahami pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah.
- Memahami rujukan hukum yang digunakan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah.
- Menganalisis pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk hal yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pendapat Syī'ah Imāmiyah tentang saksi dalam pernikahan.
- 2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai acuan pentingnya saksi dalam pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1) Hukum Islam : aturan yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis.
 Hukum Islam dalam penelitian ini adalah pendapat

mazhab empat yaitu Syāfi'i, Ḥanafi, Māliki dan Ḥambali serta KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang pernikahan khususnya yang membahas saksi dalam pernikahan.

- 2) Saksi : dua orang laki-laki yang hadir menyaksikan sebuah akad nikah atau prosesi ijab dan *qabūl*.
- 3) Syl'ah Imāmiyah : Yang dimaksud Syl'ah Imāmiyah dalam skripsi ini adalah Syl'ah išnā 'asyariyah yang mengakui dua belas imam, yaitu Ali bin Abi Ṭālib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal 'Abidin, Muhammad al-Bāqir, Ja'far aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Riḍa bin Musa, Muhammad al-Jawwād, Al-Hādi, Ḥasan al-'Askari, dan Muhammad al-Mahdi.
- 4) Asātiż : pengajar yang bermazhab Syī'ah Imāmiyah di YAPI

 Bangil baik yang menduduki jabatan fungsional

 maupun tidak serta memahami masalah fikih, terutama

 pernikahan.
- 5) YAPI Bangil : Yayasan Pesantren Islam (YAPI) yang bertempat di
 Jl. Bangil-Pandaan, desa Kenep kecamatan Beji
 kabupaten Pasuruan provinsi Jawa Timur.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah menurut Pandangan Asātīz YAPI Bangil" terbatas pada pembahasan tentang kedudukan saksi dalam pernikahan menurut pandangan asātīz YAPI Bangil, rujukan hukum yang digunakan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

- 1. Data yang Dikumpulkan
 - a. Data tentang pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi pernikahan Syī'ah Imāmiyah.
 - b. Data tentang rujukan hukum *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi pernikahan *Syī'ah Imāmiyah*.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya yakni asātiż di YAPI Bangil yang bermazhab Syī'ah Imāmiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Salah satu kegunaan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana peneliti melangkah.²⁴ Beberapa sumber data sekunder tersebut, di antaranya adalah:

- 1. Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab Lentera, 2010.
- 2. Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fikih 'Alā Mażāhib al-Arba'ah, 1990.
- 3. Sayyid Sābiq, Fikih as-Sunnah, 2006.
- 4. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Ḥusaini, Kifāyah al-Akhyār, 1994.
- 5. Ibnu Rusyd, Bidāyah Al-Mujtahid, 2005.
- 6. Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

pedoman wawancara.²⁵ Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai yaitu ketua pesantren, wakil *hauwzah* yang sekaligus mengajar dan *ustāż* di YAPI Bangil.

2) Dokumentasi

Yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis akan meneliti dokumendokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik itu data primer dan data sekunder maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan asātiz YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan Syī'ah

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif), (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Imamiyah dan rujukan hukum yang digunakan mereka. Selanjutnya terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan dari skripsi ini meliputi:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang saksi dalam pernikahan menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, pendapat ulama tentang saksi dalam akad nikah dan hikmah menyaksikan akad nikah.

Bab ketiga merupakan bab pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan Syī'ah Imāmiyah. Dimulai kajian tentang kedudukan saksi dalam pernikahan menurut Syī'ah Imāmiyah yang meliputi biografi Syī'ah Imāmiyah, metode istinbāṭ hukum Syī'ah Imāmiyah, kedudukan saksi dalam pernikahan menurut Syī'ah Imāmiyah. Dan bab ini juga memuat hasil penelitian tentang pandangan asātiż YAPI Bangil yang meliputi profil YAPI Bangil; sekilas

tentang pernikahan Syl'ah Imamiyah di YAPI Bangil; penggunaan rujukan hukum oleh asatiz YAPI Bangil; pandangan asatiz YAPI Bangil tentang saksi pernikahan; dan pelaksanaan kesaksian pernikahan.

Bab keempat merupakan bab analisis hukum Islam terhadap pandangan asātiż YAPI Bangil tentang saksi pernikahan Syī'ah Imāmiyah, analisis terhadap rujukan hukum asātiż YAPI Bangil tentang saksi pernikahan Syī'ah Imāmiyah dan analisis terhadap pelaksanaannya.

Bab kelima adalah bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi dalam Pernikahan

Saksi secara bahasa merupakan hasil terjemahan bahasa Arab بنابة yang berbentuk isim fā'il. Kata tersebut berasal dari masdar بنابة yang akar katanya adalah بنابة yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, menjadikan sebagai saksi.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi dan orang tersebut memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.² Dalam hal ini penempatan saksi adalah sebagai alat bukti.

Saksi juga digunakan dalam forum pengadilan, yakni orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau

¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 746-747.

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

terdakwa. Keterangan itu diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa guna kepentingan penyelidikan serta pengadilan tentang suatu perkara pidana.³

Ulama fikih menyebut kesaksian yang diberikan seseorang dengan alisbat (pembuktian), yaitu mengemukakan keterangan dan memberikan dalil yang dapat meyakinkan. Mayoritas fukaha menyebutnya al-bayyinah, yang diartikan dengan kata "syahadat atau persaksian", yaitu ungkapan tentang berita yang benar di depan sidang pengadilan dengan mempergunakan lafal syahadat untuk menetapkan suatu atas diri orang lain.⁴

Dengan demikian saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu kejadian atau peristiwa. Adapun saksi dalam pernikahan berarti orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

Mengenai dasar hukum saksi dalam pernikahan, Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang secara tegas menyinggungnya⁵, namun dasar hukum saksi terdapat dalam hadis-hadis sebagai berikut:

³ Nina M. Armando[et al.], *Enslikopedi Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 115.

[&]quot; Ibid

⁵ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2007), 270.

1. Hadis dari Ibnu 'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَعَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَعْيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَعَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيْدِ

Artinya: "Yūsuf bin Hammād Al-Ma'niy Al-Baṣriy menceritakan kepada kami, 'Abdul A'lā menceritakan kepada kami dari Sa'ld dari Qatādah dari Jābir bin Zaid dari Ibnu 'Abbās sesungguhnya Nabi SAW bersabda: pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi."

2. Dari 'Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

نَا أَبَوْ ذَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْن بْن عِبَاد النَّسَائِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بْن سِنَان نَا أَبِيْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. 7

Artinya: "Abū Żar Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakr menceritakan kepada kami, Aḥmad bin Al-Husain bin 'Ibād an-Nasāiy menceritakan, Muhammad bin Yazīd bin Sinān menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyām bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Āisyah berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Kalimat Lā nāfi lil jinsi dalam lafaz لَا نِكَاحُ menunjuk pada keabsahan

الصحّة), sehingga artinya tidak sah. Maksudnya adalah mempersaksikan

⁶ Tirmiżi, Sunan at-Tirmiżi, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 354.

⁷ Ali bin Umar Ad-Dār Quṭni, Sunan ad-Dār Quṭni, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 138.

terjadinya akad nikah (ijab dan *qabūl*) merupakan syarat sah nikah. Dengan demikian akad nikah yang tidak dipersaksikan, maka akad menjadi *fasid*.8

3. Hadis dari Abu Zubair al-Makkiy

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya, dari Mālik, dari Abī az-Zubair al-Makky bahwa Umar bin Khaṭṭāb menerima pengaduan adanya pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu jawabnya: ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan, dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam."

Hadis-hadis di atas sekalipun martabatnya lemah, namun satu dengan yang lain menguatkan. Hal ini sebagaimana komentar yang dilontarkan Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Auṭār bahwasanya hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam menetapkan akan keharusan dua saksi dalam akad nikah adalah hadis-hadis $d\bar{a}'if$, tetapi hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu sama lainnya.

⁸ 'Alāuddīn Abī Bakar ibn Mas'ud al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi' fī Tartīb as-Syarāi'*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.) 392.

⁹ Mālik, Al-Muwaṭṭa, (Muassasah Zāyid bin Sulṭan Ali Nahyan, 2004), 767.

Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nailul Auțar, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 134.

B. Syarat-Syarat Saksi

Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi umat manusia. Tidak heran jika momen ini diselenggarakan dengan acara seremonial. Hal ini tidak bertentangan agama selama masih dalam batas yang wajar. Mengingat betapa pentingnya pernikahan tersebut, dalam upacara pernikahan diperlukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah syarat yang berkaitan dengan saksi.

Masing-masing ulama fikih menetapkan syarat-syarat saksi dengan beragam. Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa syarat menjadi saksi yaitu berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab *qabūl* pernikahan.¹¹

Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayah al-Akhyār* menyebutkan 6 syarat untuk menjadi saksi, yaitu: Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. 12

Sedangkan golongan *Ḥanafiyyah* menetapkan 5 syarat untuk menjadi saksi, yaitu:

- 1. Berakal, orang gila tidak boleh menjadi saksi.
- 2. Balig, kesaksian anak kecil tidak boleh.
- 3. Merdeka, sehingga hamba sahaya tidak boleh menjadi saksi.

¹¹ Sayyid Sābiq, Figh as-Sunnah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 480-481.

¹² Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad al-Ḥusaiyniy, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 41.

4. Islam. Oleh karena itu orang kafir tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan pasangan muslim karena mereka tidak memiliki hak perwalian (ahlul wilāyah) bagi muslim.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā'ayat 141:

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."

5. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabūl dua orang yang berakad.¹⁵

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa rupanya golongan Ḥanafiyyah tidak menjadikan adil sebagai persyaratan mutlak. Oleh karena itu orang yang fasik boleh menjadi saksi, karena tujuan saksi hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu telah berlangsung. Allah berfirman dalam surat al-Hujurāt ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)

¹³ Al-Kasani, *Badai 'u as-Sanai'*, 253.

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 101.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jazīrī, Al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Arba'ah, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1990), 20-21.

¹⁶ Syamsuddin as-Sarkhasi, Al-Mabsūṭ, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 31.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Berdasar ayat di atas dipahami bahwa sebagai orang muslim hendaknya meneliti terlebih dahulu berita-berita yang dibawa dari orang fasik. Alangkah baiknya jika berita itu diterima setelah dicek kebenarannya. Bilamana orang fasik menjadi saksi maka hendaknya orang fasik itu dapat dipercaya agar persaksiannya dapat diterima. 18

Imam Hambali mengatakan syarat menjadi saksi adalah: dua orang lakilaki yang balig, berakal, adil, beragama Islam yang dapat berbicara dan mendengar, keduanya tidak berasal dari satu keturunan dua mempelai.¹⁹

Golongan Syāfi'iyyah mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah: balig, berakal, laki-laki, Islam, mendengar, adil.²⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan, di antaranya: berakal sehat, dewasa, mendengar ucapan kedua belah pihak yang berakad dan memahami bahwa ucapan itu adalah ijab *qabūl* pernikahan. Bila para saksi itu buta maka

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 516.

¹⁸ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.

¹⁹ Al-Jazīrī, Al-Fiqh, 24.

²⁰ *Ibid.*, 23.

hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua orang yang berakad.

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi, karena kehadiran saksi itu di samping menyaksikan akad nikah, juga menyaksikan pemberitahuan bahwa akad nikah itu telah berlangsung. Bila suatu saat salah seorang suami istri ingkar maka saksi itu yang akan memberi kesaksian di pengadilan. Hal seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang waras atau sehat akalnya.²¹ Berikut ini penjelasannya.

a) Balig

Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang balig), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, dia dapat dan harus bertanggung jawab atas kesaksiannya itu. Kedua syarat tersebut di atas disepakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah *mukallaf.*²²

b) Mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabūl

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab dan *qabūl* kedua orang yang akad yaitu antara wali dan calon pengantin laki-laki.²³ Bagaimana

²¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.149-150.

²² *Ibid.*, 150.

²³ Al-Jazīrī, Al-Figh, 21.

mungkin orang dijadikan saksi padahal dia tidak mengerti apa yang disaksikannya. Persyaratan ini di kemukakan oleh sebagian besar fukaha.

c) Laki-laki

Syarat żukūrah dalam masalah saksi pernikahan rupanya menjadi kontroversi di kalangan ulama. Bagi mayoritas ulama, laki-laki menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan. Namun dari golongan Ḥanafiyyah tidak mensyaratkan demikian.²⁴

Dua orang saksi harus laki-laki dan tidak sah akad nikah bila yang menjadi saksi wanita semua, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Hal ini didasarkan pada surat *al-Baqarah*: 282 sebagai berikut:

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." 25

Golongan Syāfi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak sah, sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya: Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian

²⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 150.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 48.

kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan biasanya yang menghadiri adalah laki-laki. Karena itu tidak sah akad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan.²⁶

Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah.²⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 282 di atas.

Akad nikah sama dengan jual beli, yaitu perjanjian timbal balik ini dianggap sah dengan saksi dua orang perempuan di samping seorang laki-laki.²⁸

Mengenai perempuan boleh memberikan kesaksiannya atau tidak, seorang aktivis dan pemerhati tentang isu perempuan Syafiq Hasyim memberikan komentar bahwa pada dasarnya perempuan dalam persoalan kesaksian menghadapi dua hal. *Pertama*, perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi. *Kedua*, meskipun boleh memberikan

²⁶ Sayyid Sābiq, Figh, 481.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

kesaksian, nilai kesaksian dua perempuan sama nilainya dengan kesaksian seorang laki-laki.²⁹

d) Jumlah saksi

Saksi sekurang-kurangnya dua orang sebagaimana telah disebutkan pada hadis yang diriwayatkan oleh $D\bar{a}r$ al-Qutni di atas.

Hanafiyyah membenarkan dalam kasus seperti: seseorang menyuruh orang lain untuk menikahkan anaknya yang masih kecil (belum dewasa). Pada saat itu ada seorang laki-laki yang hadir bersama bapak anak wanita itu sebagai saksi. Pernikahan seperti ini dipandang sah, karena bapaknya ikut serta menyaksikan akad nikah itu. Berbeda sekiranya bapaknya tidak ikut menyaksikan, seperti tidak ada di tempat, nikah itu tidak sah karena saksi hanya seorang saja. 30

e) Adil

Adil berasal dari kata bahasa Arab al-'adlu. Akar kata dari 'adalaya'dilu-'adalah. Sedangkan orang yang adil adalah 'adil berupa isim fa'il.
Artinya adalah ketulusan hati, yang sama, sepadan. Adapun persamaan kata dari al-'adlu adalah al-amrul mutawassitu yang artinya perkara yang tengahtengah.³¹

²⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam,* (Bandung: Mizan, 2001), 228.

³⁰ Al-Jazīrī, Al-Fiqh, 20.

³¹ Ahmad Warson Munir, Al-Munawwir, 905-906.

Dalam kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu disebutkan bahwa adil yang dimaksud dalam persyaratan saksi ialah adil meski secara zāhir saja.

Adil itu sendiri diartikan dengan orang yang memiliki ketulusan hati dan mengikuti ajaran-ajaran agama meski hanya luarnya saja. 32

Dengan demikian menjadi jelas bahwa saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriahnya saja. Yaitu orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil. Dosa besar seperti zina, membunuh. Adapun dosa kecil seperti mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas untuk didengar. Demikian pendapat jumhur ulama. Bahkan Syāfi iyyah menegaskan bahwa pernikahan dianggap tidak sah bila saksinya fasik.

Berbeda dengan *Ḥanafiyyah*, adil tidak menjadi persyaratan yang mutlak dan orang fasik pun dapat menjadi saksi karena tujuan saksi itu hadir untuk mengetahui bahwa pernikahan itu telah berlangsung.³⁵

Tetapi Abu Ḥanifah dan Abi Yusuf berpendapat bila pernikahan itu antara laki-laki muslim dan perempuan ahli al-kitāb maka kesaksian dua

Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 67.

³³ Ibnu Mas'ud, Zainal 'Abldin S., Fiqih Madzhab Syafi'i, buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 624.

³⁴ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 151.

³⁵ As-Sarkhasi, Al-Mabsūt, 31.

orang ahli al-kitāb boleh diterima dan pendapat ini diikuti oleh Undang-Undang Mesir.³⁶

f) Melihat dan mendengar

Saksi harus orang yang melihat dan tidak bisa diterima orang yang buta. Demikian pendapat yang kuat menurut *Syāfi iyyah*. Sedangkan *jumhūr ulama* dapat menerima kesaksian orang yang buta asalkan ia dapat mendengar dengan baik ijab dan *qabūl* itu dan dapat membedakan suara wali dengan calon pengantin laki-laki itu.³⁷

Saksi harus mendengar ucapan dua orang yang berakad semuanya, sehingga apabila yang mendengar salah satunya saja yang lain tidak, ataupun mendengar ucapan dengan kedua orang yang berakad dan ucapannya lain maka tidak sah nikah, karena saksi yang dikehendaki adalah hadirnya saksi yang menjadi rukun akad nikah dan rukun akad yaitu ijab *qabūl* maka apabila saksi tidak bisa mendengar ucapan ijab dan *qabūl* maka tidak jelas saksi menjadi rukun, maka tidak ditemukan syarat rukun.³⁸

Akad nikah tidak sah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi yang muslim keduanya, *mukallaf*, merdeka, laki-laki dan adil dan juga disyaratkan lagi saksi harus dapat diterima kesaksiannya untuk setiap orang untuk kedua

³⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh*, 481.

³⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 152.

³⁸ Al-Kasāni, *Badāi'u as-Şanāi'*, 401.

mempelai. Dan kedua saksi harus dapat mendengar dan melihat serta mengetahui ucapan ijab kabul kedua orang yang berakad.³⁹

C. Pendapat Ulama tentang Saksi dalam Pernikahan

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai saksi dalam pernikahan. Hal tersebut dikarenakan sudut pandang masing-masing ulama berbeda-beda dalam menentukan kedudukan saksi dalam pernikahan apakah menjadi syarat sah akad nikah atau penyempurnaan saja ketika bersetubuh. Selain itu dasar hukum yang mereka gunakan juga berbeda.

Abu Ḥanīfah, Syāfi'i, dan Mālik sepakat bahwa saksi merupakan syarat nikah. Akan tetapi mereka berselisih mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan apakah merupakan syarat penyempurnaan ketika bersetubuh atau syarat sah ketika akad.⁴⁰

Adapun Syāfi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa pernikahan itu tidak sah tanpa adanya saksi. 41 Hal ini menunjukkan bahwa bagi mereka saksi merupakan syarat sah pernikahan. Di mana saksi harus hadir ketika akad nikah.

Sedangkan menurut golongan *Mālikiyyah*, saksi merupakan syarat sempurnanya pernikahan bukan syarat sah pernikahan. Mereka mengatakan

³⁹ Taqiyuddin, Kifayah, 41.

⁴⁰ Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 15.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Khamsah, (Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Mażhab), (Jakarta: Lentera, 2010), 313.



bahwa saksi hukumnya sunnah ketika akad nikah karena untuk meredam perselisihan. Pendapat ini juga diikuti oleh Abdullah bin Umar, 'Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Hasan bin Ali dan dari kelompok ahli hadis seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Yazid bin Harun. 42

Dalam hal ini Maliki juga mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan ini sama kedudukannya dengan talak ba'in.43

Bagi mereka yang disyaratkan dalam pernikahan adalah memberitahukan (al-i'lan). Jadi selama pernikahan itu diberitahukan ke orang lain tanpa adanya saksi maka sah. Sedangkan jika pernikahan itu dihadiri saksi namun disuruh untuk menyembunyikan pernikahan, maka tidak boleh. 44

Sebab perselisihan mereka adalah apakah saksi merupakan hukum svar'i atau maksud daripada saksi adalah untuk meredam perselisihan dan pengingkaran. Bagi yang mengatakan saksi merupakan hukum syar'i maka berpendapat kalau saksi merupakan syarat sah pernikahan. Sedangkan bagi yang

⁴² Al-Kasani, Badai'u as-Sanai', 391-392.

⁴³ Jawad Mughniyah, Al-Figh 'Ala Mażahib, 314.

⁴⁴ Al-Kasani, Badai 'u as-Sanai', 391-392.

mengatakan maksud daripada saksi adalah untuk meredam perselisihan dan pengingkaran maka berpendapat bahwa saksi merupakan syarat penyempurnaan.⁴⁵

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi dalam akad nikah masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan saksi itu wajib dalam akad nikah ada juga yang mengatakan tidak.

D. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutuhkan pengakuan dari pihak lain bahwa dirinya sudah menjalankan pernikahan yang sah menurut agama. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (tanpa saksi) akan mengundang prasangka buruk, dan menimbulkan fitnah. Dalam bahasa sederhananya, pernikahan yang demikian akan menimbulkan bermacam-macam gosip miring yang merugikan bagi pasangan pengantin (terutama) dan semua keluarganya.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁴⁷

⁴⁵ Ibnu Rusyd, Bidāyah, 15.

⁴⁶ Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang tak Terpikirkan, 228.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 153.

Sudah selayaknya pernikahan yang didasari dengan cinta kasih dan disetujui oleh kedua mempelai beserta keluarga dari kedua belah pihak, tidak perlu untuk disembunyikan. Bilamana tidak ada saksi yang menghadiri akad pernikahan, maka akan menimbulkan kesan bahwa pernikahan itu dilaksanakan dalam keadaan terpaksa atau sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh orang kebanyakan.

Di sinilah, letak urgensinya saksi dalam akad nikah. Tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Begitu juga bila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad pernikahan dari pasangan suami istri. 48

Menaiki tangga pernikahan dengan melaksanakan akad nikah, merupakan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Manakala masyarakat memberikan penghormatan dengan menghadiri prosesi akad nikah itu akan menjadi dorongan tersendiri bagi kedua mempelai untuk membina rumah tangga dengan sebaik mungkin. Dengan hadirnya saksi dari masyarakat merupakan penghormatan dari masyarakat kepada kedua mempelai. Selain itu, pernikahan merupakan salah satu dari sunah-sunah Nabi yang sudah selayaknya diikuti dan dilaksanakan oleh umatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap sunah Nabi. 49

⁴⁸ Abd. Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 65.

⁴⁹ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam, 104-105.

Pernikahan juga berkaitan dengan pihak lain yang turut terlibat dalam hak kedua belah pihak yang berakad, yaitu anak-anak. Karena itu dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi agar nantinya ayahnya tidak mengingkari keturunannya.⁵⁰

Sehubungan dengan anak-anak adalah untuk memelihara hak-hak mereka dalam warisan. Sebagaimana pendapat Al-Jurjawi bahwa pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, di antaranya memelihara hak-hak dalam warisan.⁵¹

Dari sekian banyak pemaparan di atas, Kamal Mukhtar dalam bukunya Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan menyebutkan hikmah adanya saksi dalam pernikahan secara rinci, yaitu: sebagai alat bukti, apabila ada yang menggugat keabsahan pernikahan; i'lān, dengan hadirnya saksi-saksi di waktu akad nikah, maka i'lān yang minimum akan terlaksana, kehadiran saksi-saksi di waktu akad nikah merupakan penghormatan kepada kedua mempelai, dan merupakan penghormatan bagi sunah Rasulullah SAW. 52

50 Sayyid Sābiq, Fiqh, 480.

⁵¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Mesir: al-Azhar, 1992), 258.

⁵² Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam, 105.

$BAB \coprod$

PANDANGAN ASĀTIŻ YAPI BANGIL TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN SYĪ'AH IMĀMIYAH

A. Saksi Dalam Pernikahan Menurut Syī'ah Imāmiyah

1. Sekilas tentang Syī'ah Imāmiyah

Makna dasar kata Syī'ah adalah pengikut atau pemihak terhadap seseorang atau kelompok. Dalam penerapannya makna ini berkembang, sehingga Syī'ah diartikan sebagai kelompok pendukung Ali bin Abī Ṭālib.¹ Sedangkan menurut istilah, asy-Syahrastani dalam kitab al-Milal wa an-Nihal mengatakan bahwa Syī'ah adalah kelompok yang mengikuti dan mendukung Ali serta berkeyakinan bahwa dia adalah imam dan khalifah (pengganti) yang ditunjuk berdasarkan naṣ dan wasiat, baik wasiat itu secara eksplisit maupun implisit dan mereka berkeyakinan bahwa imāmah tidak keluar dari anak keturunannya.²

Adapun *Imāmiyah* adalah kelompok *Syī'ah* yang berpendapat bahwa Ali bin Abī Ṭālib secara *naṣ* dinyatakan sebagai imam bukan hanya disebut sifatnya saja namun ditunjuk orangnya.³ Aliran ini menjadikan semua urusan

¹ Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Akidah Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 587.

² Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Penerjemah: Asywadie Syukur, *Al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam*), buku I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 124.

³ *Ibid.*, 138-139.

agama merujuk kepada imam.⁴ Tidak ada yang terpenting dalam ajaran agama dan Islam selain dari menunjuk imam karenanya Rasulullah sampai akhir hayatnya selalu mengurus urusan umat. Diangkatnya imam adalah untuk menghilangkan semua perselisihan dan mempersatukan umat. Tidak boleh membiarkan umat mempunyai pandangan sendiri-sendiri, berjalan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu wajib mengangkat seorang yang perkataannya ditaati umat. Penunjukan secara naṣ lebih tegas dan lebih kuat dari penunjukan semu. Ali bin Abi Ṭālib telah ditunjuk dalam beberapa nas baik secara tersurat maupun tersirat.⁵

Jadi, Syī'ah Imāmiyah adalah salah satu sekte dalam Syī'ah yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Ṭālib sebagai imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar, Umar maupun Usman. Bagi mereka, persoalan imāmah adalah salah satu persoalan pokok dalam agama atau uṣūluddīn.6

Penunjukan terhadap Ali, secara tersirat seperti Rasulullah mengutus Abu Bakar memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan haji akbar. Kemudian Allah mengutus Ali bin Abi Ṭālib untuk

⁴ Muslim Fathoni, *Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 33.

⁵ Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, 139.

⁶ Nina M. Armando[et al.], *Enslikopedi Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 315.

membacakan surat at-Taubah ke tengah jamaah dan ia membacanya ke tengah jamaah atas perintah Rasulullah. Rasulullah berkata: telah turun Jibril membawa wahyu kepadaku. Katanya hendaklah yang menyampaikannya seorang dari engkau atau katanya dari kaummu. Inilah riwayat yang memberi isyarat mendahulukan Ali dari yang lainnya. Juga Rasulullah sering memerintahkan Abu Bakar dan Umar bergabung dengan pasukan yang dipimpin orang lain. Demikian juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan Amru bin Aş bergabung dengan pasukan lain dan Usāmah bin Zaid dengan pasukan lain. Namun Rasulullah tidak pernah memerintahkan Ali bin Abī Ṭālib bergabung dengan pasukan lain tetapi beliau menerima perintah langsung dari Rasulullah.

Tidak ada keterangan yang jelas tentang imāmah melalui tunjukan setelah al-Ḥasan, al-Ḥusain dan Ali bin Ḥusain dan masalah inilah yang menjadi pokok perselisihan di kalangan Syī'ah Imāmiyah, sehingga ada yang menghitung perselisihan dalam masalah ini mencapai 70 kelompok di kalangan Syī'ah dan sebagian lagi di kalangan Khawārij. Mereka bersepakat imāmah berlanjut sampai Ja'far bin Muhammad aṣ-Ṣādiq tetapi keturunan sesudahnya mereka berbeda pendapat. Menurut riwayat dari kalangan Syī'ah, Ja'far aṣ-Ṣādiq memiliki 5 putra dan menurut riwayat lain enam orang. Enam orang putra Ja'far ialah Muhammad, Ishak, Abdullah, Musa, Ismā'il dan Ali.

⁷ Asy-Syahrastàni, *Al-Milal wa an-Nihal*, 143.

Menurut kelompok yang mengakui *imāmah* melalui penunjukan, yang ditunjuk sebagai imam adalah dari keturunan Muhammad, Abdullah, Musa, dan Ismā'il, karena yang mengatakan *imāmah* terhenti karena imam yang terakhir akan muncul kembali dan ada pula yang mengatakan *imāmah* akan berlanjut terus.⁸

Orang-orang Syī'ah Imāmiyah pada mulanya melaksanakan ajaran imamnya dalam masalah akidah, tetapi setelah berabad-abad lahirlah imamimam yang membawa ajaran yang simpang siur dan setiap imam membawakan ajaran masing-masing sehingga lahirlah kelompok-kelompok. Sebagian kelompok mengikuti ajaran mazhab Mu'tazilah, Wa'idiyyah, Tafṣīliyyah, sebagian lagi Ikhbāriyyah baik Musyabbahah maupun Salafiyyah dan sebagian lagi tersesat.

Golongan Syī'ah Imāmiyah juga disebut dengan golongan Išnā 'Asyariyah (imam dua belas), karena mereka hanya ada dua belas orang imam yang wajib diikuti, yaitu: Ali bin Abī Ṭālib, Ḥasan bin Ali, Ḥusain bin Ali, Ali Zainal 'Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far aṣ-Ṣādiq, Musa bin Ja'far, Ali ar-Riḍā bin Musa, Muhammad al-Jawwād, Al-Hādi, Ḥasan al- al-'Askari, dan Muhammad al-Mahdi.¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), 107.

2. Metode Istinbāt Hukum Syī'ah Imāmiyah

Dasar tasyrī' mazhab ini adalah al-Qur'an, sunnah, ijmā' yang menurut mereka persetujuan ulama yang dibenarkan oleh imam yang ma'sūm, bukan semata-mata persetujuan pendapat ulama dan akal pikiran (rasio). Mengenai sunnah mereka hanya menerima hadis-hadis yang perawi atau sanadnya kepada ahli bait.¹¹

Sebagaimana halnya dengan mazhab Sunnī, maka golongan Syī'ah berpendapat bahwa pokok-pokok pegangan mereka dalam menetapkan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, ialah¹²:

- Al-Kāfi disusun oleh Ja'far Muhammad bin Ya'kub Al-Kulaini (wafat 329 H.)
- Man lā Yadhurul faqih disusun oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali Husain (wafat 381 H.)
- 3) At-Tahżīb
- 4) Al-I'tibar. Dua buah buku terakhir ini disusun oleh Muhammad bin Ḥasan aṭ-Ṭūsi.

Di antara penganut Syī'ah Imāmiyah terdapat perbedaan pendapat dalam menggunakan akal sebagai pokok pegangan dalam menetapkan hukum. Ada dua golongan dalam hal ini, yaitu:

¹¹ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 242-243.

¹² Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran, 108.

a) Golongan Akhbāriyyah

Akbari berasal dari kata *akhbār*, bentuk jamak dari khabar, artinya berita atau informasi. Dalam ilmu *musṭalāh al-hadīs* term khabar digunakan untuk istilah selain dari hadis Nabi. 13

Golongan Akhbāriyyah berpendapat bahwa mereka hanya berpegang kepada empat kitab di atas, semua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab itu dapat dijadikan dasar hujjah, karena semuanya adalah hadis sahih. 14 Dengan kata lain, golongan Akhbāriyyah dapat dipahami sebagai ahli hadis.

b) Golongan Uşūliyyin

Term *uṣūli* berasal dari kata *aṣl*, berarti dasar, fundamen, prinsip atau sumber hukum Islam. Dalam perspektif *Sunnī* golongan *Uṣūliyyīn* bisa dipahami sebagai ahli *ra'yi*.¹⁵

Golongan *Uṣūliyyīn* mempelajari *uṣūl* fikih dan menggunakannya dalam *istinbāṭ* hukum, karena itu mereka meneliti dan menilai hadishadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang empat itu. Setelah mereka yakin kesahihan hadis-hadis itu barulah mereka menggunakannya sebagai dasar *hujjah*. 16

¹³ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, 243.

¹⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, 108.

¹⁵ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, 243.

¹⁶ Muslim Ibrahim, Pengantar Figh Mugaaran, 108.

1. Sumber hukum¹⁷

- a. Kaum *Uṣūli* menyetujui otoritas sumber hukum al-Qur'an, *sunnah*, ijmak, dan akal. Sedang *Akhbāri* hanya mengakui al-Qur'an dan *sunnah* bahkan sebagian ada yang hanya mengakui *sunnah*.
- b. *Uṣūli* mengakui dan menggunakan makna *literal* (tersirat) dalam al-Qur'an dan hadis melalui akal, sedang *Akhbāri* hanya bisa dipahami maknanya secara tersurat oleh komentar para Imam.
- c. *Uṣūli* hanya mengakui otoritas hadis dari para imam yang diriwayatkan oleh orang *Syī'ah* tepercaya, sedang *Akhbāri* mengakui hadis kaum *Sunnī* dan sumber lainnya yang terlindung dari pemalsuan.
- d. *Uṣūli* hanya membagi hadis ke dalam hadis sahih, ḥasan, *mutawātir* dan *ḍa If*, sedangkan *Akhbāri* membagi dua yaitu sahih dan *ḍa If*.
- e. *Uṣūli* menganggap produk hukum 'aql tidak bertentangan dengan sumber naql, sedang Akhbāri mengatakan ada pertentangan.

2. Prinsip Fikih¹⁸

- a. *Uṣūli* menyetujui ijtihad, sedang *Akhbāri* menolak ijtihad.
- b. *Uṣūli* menganggap putusan hukum bisa berdasarkan *zan* melalui ijtihad, sedang *Akhbāri* hanya bisa berdasarkan kepastian melalui hadis yang relevan dari Imam.
- c. *Uṣūli* melalui ijtihad, hadis bisa diuji, suatu hadis bisa dipilih karena hadis lain yang mengandung kontradiksi dan praktek keagamaan bisa berdasar teks yang punya pengertian ganda, sedangkan *Akhbāri* hanya menggunakan teks tersurat dari para ulama.

3. Posisi Faqīh¹⁹

- a. *Uṣūli* membagi manusia kepada kelompok mujtahid dan *muqallid*, sedang *Akhbāri* semua orang *muqallid* terhadap Imam dan tidak dibenarkan taklid kepada mujtahid.
- b. *Uṣūli* mengatakan mujtahid harus menguasai banyak pengetahuan tentang hadis.
- c. *Uṣūli* menganggap wajib mematuhi mujtahid sebagaimana mematuhi Imam, sedang *Akhbāri* menolaknya.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 244.

¹⁸ Ibid., 244-245.

¹⁹ Ibid., 245.

d. *Uṣūli* menganggap ijtihad mendapat pahala sekalipun salah, sedang *Akhbāri* memutuskan perkara tidak berdasarkan hadis adalah terkutuk.

3. Pendapat Syī'ah Imāmiyah tentang Saksi dalam Pernikahan

Kedudukan saksi dalam pernikahan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Mayoritas ulama menempatkan saksi ke dalam syarat sah nikah. Itu artinya mereka memandang bahwa saksi dalam pernikahan sangat penting. Hal ini juga dapat dipahami bahwa pernikahan tanpa kehadiran saksi menjadi tidak sah, walaupun pernikahan tersebut diumumkan dengan cara lain, karena saksi menjadi syarat sah nikah.

Imam Syāfi'i, Ḥanafi dan Ḥambali sepakat mengenai saksi menjadi syarat sah nikah. Sedangkan Imam Malik berpandangan bahwa saksi dalam pernikahan menjadi syarat sempurna. Oleh karena itu dalam akad nikah tidak perlu adanya saksi yang hadir untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Namun, ia justru mewajibkan hadirnya saksi saat kedua mempelai akan bersetubuh (dukhūl).

Masalah saksi dalam pernikahan juga mendapat perhatian khusus bagi mazhab Syī'ah Imāmiyah. Mazhab ini menolak pendapat jumhūr yang mengatakan saksi sebagai syarat sah pernikahan. Bagi golongan Syī'ah Imāmiyah, kedudukan saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah sebuah pernikahan. Ini artinya, jika pernikahan itu tidak dihadiri saksi maka pernikahan itu tetap sah.

Jawad Mughniyah dalam kitab *al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Khamsah* menyebutkan bahwa saksi dalam pernikahan hukumnya *istiḥbāb*, dianjurkan, dan bukan merupakan kewajiban.²⁰

Mereka menyatakan tidak ada *naṣ* al-Qur'an tentang kewajiban persaksian dalam pernikahan.²¹ Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pakar tafsir Quraish Shihab yang memberikan komentar dalam masalah saksi bahwa menurutnya tidak ditemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya.²²

Dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* yang ditulis oleh Imam Khamayniy disebutkan bahwa menyaksikan akad nikah hukumnya sunah.²³ Pendapat ini juga diikuti oleh Abdullah bin Umar, 'Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Hasan bin Ali dan dari kelompok ahli hadis seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Yazīd bin Harun.

Sedangkan bagi *Syī'ah Imāmiyah* hadis yang digunakan sebagai dalil tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah yaitu hadis yang terdapat dalam kitab pokok pegangan orang *Syī'ah* yaitu kitab *al-Kāfī* sebagai berikut:

Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'Alā Mażāhib al-Khamsah, (Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Mażhab), (Jakarta: Lentera, 2010), 314.

²¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 69.

²² M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2007), 270.

²³ As-Sayyid al-Khamayniy, *Taḥrīr al-Wasīlah*, Juz 2, t.p., t.t., 238.

Artinya: "Ali bin Ibrāhīm dari Ibnu Abī 'Umayr, dari Umar bin Użaynah, dari Zarārah bin A'yun berkata: Abū 'Abdillah AS ditanya mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa saksi, kemudian beliau menjawab: sama sekali tidak apa-apa menikah yang demikian, hal itu merupakan urusan antara dia dan Allah. Sesungguhnya saksi dalam pernikahan itu diperlukan untuk kepentingan anak, jikalau tidak ada maka tidak apa-apa."

Berangkat dari hadis tersebut rupanya golongan Syī'ah Imāmiyah ini tidak mempersyaratkan kesaksian dalam pernikahan. Dalam sebuah keterangan yang terdapat dalam kitab al-Mukhtaṣar an-Nāfī' fī Fiqh al-Imāmiyah dikatakan bahwa pengumuman (al-i'lān) dalam nikah dāim hukumnya sunah²⁵. Menurut ulama Syī'ah saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah nikah. Pendapat demikian juga diikuti oleh Ibnu Umar, Ibnu Zubair, 'Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun dan ahli zāhir yaitu Daud dan lainnya. Hal ini juga sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar.²⁶

²⁴Abū Ja'far Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq al-Kulayny ar-Rāzi, *Al-Kāfī*, Juz 5, t.p., t.t., 387.

²⁵ Dalam mazhab Syi'ah dikenal istilah nikah *daim* dan nikah *mut'ah*. Nikah *daim* yaitu nikah untuk selamanya sedangkan nikah *mut'ah* adalah nikah untuk batas waktu yang telah ditentukan.

²⁶ Abū al-Qāsim Najm ad-Din Ja'far bin Ḥasan al-Ḥalli, *Al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fi Fiqh al-Imāmiyah*, t.p., t.t., 171.

Adanya saksi dalam pernikahan pada dasarnya adalah untuk menjaga nasab dan urusan waris. Sebagaimana hadis berikut:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، وَمُحَمَّد بْن يَحْبَى، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا، عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ، عَنْ هِسَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ (ع) قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ البَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيْثِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ فَشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ (ع) قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتْ البَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيْثِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ أَخْرَى وَالْحُدُودِ. 27

Artinya: "Ali bin Ibrāhīm dari bapaknya, Muhammad bin Yahya dari Abdillah bin Muhammad secara bersama-sama, dari Ibnu Abi 'Umayr, dari Hisyām bin Sālim, dari Abī 'Abdillāh berkata: sesungguhnya kesaksian itu dijadikan untuk nasab dan waris. Dalam riwayat lain untuk hudūd."

Mereka bersih kukuh pada pendapat tersebut, dengan alasan bahwasanya di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kesaksian dalam pernikahan, tetapi Allah memerintahkan kesaksian itu dalam masalah jual beli dan hutang. Sebenarnya, masalah saksi dalam pernikahan itu lebih banyak dibutuhkan untuk menjaga *nasab*, menghilangkan prasangka buruk, warisan dan lain-lain. Oleh karena itu, jikalau saksi dalam pernikahan menjadi syarat, mengapa Allah mempermudah urusan ini dalam al-Qur'an yang dapat menghilangkan hikmah.²⁸

Adapun hadis yang juga dijadikan dasar mengenai tidak wajibnya saksi dalam pernikahan oleh Syī'ah Imāmiyah adalah sebagai berikut:

²⁷ Al-Kulayny, *Al-Kāfī*, 387.

²⁸ Abū al-Qāsim, *Al-Mukhtaṣar an-Nāfi*, 171.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْهِ، ومحمد بن إسماعيل، عَنِ الفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُمَيْرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبُحْتُرِيْ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ (ع) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ: لَا بَأْسَ.²⁹

Artinya: "Ali bin Ibrāhīm dari bapaknya, Muhammad bin Ismā'il dari al-Faḍl bin Syāzān, dari Abī 'Umayr dari Ḥafṣ bin al-Bukhturiy dari Abi 'Abdillāh dalam masalah pernikahan tanpa saksi maka beliau menjawab: tidak apa-apa."

عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيْ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَخْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ فِيْ اللهُ شَارِكَ وَ تَعَالَى أَمَرَ فِيْ اللهُ عَدْلَيْنِ وَأَمَرَ فِيْ كِتَابِهِ بِالتَّرُونِيْجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا صَدْلَيْنِ وَأَمْرَ فِيْ كِتَابِهِ بِالتَّرُونِيْجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شَهُوْدٍ فَأَثْبَتُمْ شَاهِدَيْنِ فِيْمَا أَهْمَلُ وَأَبْطِلْتُمُ الشَّاهِدَيْنِ فِيْمَا أَكْدَ. 30

Artinya: "Segolongan dari sahabat kita, dari Sahl bin Ziyād dari Daud an-Nahdiy, dari Ibnu Abī Najrān, dari Muhammad bin al-Fuḍayl berkata:
Abu al-Ḥasan Musa berkata kepada Yusuf al-Qāḍi: sesungguhnya
Allah dalam kitab-Nya menyebutkan masalah talak dan
memperkuatnya dengan dua orang saksi dan tidak rela bagi kedua
saksi tersebut kecuali yang adil, dan Allah juga memerintahkan
pernikahan dalam kitab-Nya dan mempermudahnya dengan tanpa
saksi."

Mengacu pada hadis-hadis di atas, mazhab Syī'ah Imamiyah tetap pada pendiriannya bahwa pernikahan tanpa saksi hukumnya sah. Karena selain tidak ada nas yang menyinggung kesaksian dalam masalah nikah, serta Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar juga pernah melakukan hal demikian.

²⁹ Al-Kulayny, *Al-Kāfī*, 387.

³⁰ Ibid.

B. Pandangan Asātiz YAPI Bangil tentang Saksi Pernikahan Syī'ah Imāmiyah

1. Profil YAPI Bangil

Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil didirikan oleh almarhum ustāż Husein bin Abu Bakar al-Habsyi pada tanggal 21 Juni 1976. Pesantren ini awalnya hanya mengembangkan pendidikan agama murni. Tetapi sejak tahun 1997, mulai mengembangkan perpaduan antara pendidikan Agama dan Umum. Pesantren ini adalah salah satu pesantren yang mengembangkan wawasan diniyah keagamaan yang beragam. Di mana dalam Pesantren ini tidak hanya diajarkan kurikulum pesantren pada umumnya (mulai al-Qur'an, hadis, tafsir, falsafah, mantīq dan lain-lain). Pesantren ini juga mengajarkan dan mengembangkan pemikiran Syī'ah di samping tentunya Ahlus Sunnah.

Sebagai lembaga dakwah dan pendidikan, YAPI berkiprah dalam pengelolaan lahan-lahan pendidikan keagamaan yang bertujuan mencetak para santri yang diharapkan mampu menjadi cikal bakal bagi sumber daya manusia masa depan yang tangguh serta mampu menyikapi berbagai masalah secara arif. Demi meraih tujuan-tujuannya, YAPI merasa berkewajiban menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dianggap perlu dan sesuai dengan lingkup kegiatannya. Kurikulum dan aktivitas Pesantren di rancang sesuai dengan kebutuhan para santri dalam membina dirinya menjadi pribadi muslim berkeyakinan lurus (benar) dan sadar akan kewajiban-kewajibannya, baik hubungan dengan Tuhan maupun antar sesamanya, serta

memiliki kapasitas keilmuan yang memadai terutama ilmu-ilmu keislaman, sebagai dasar pijakan dalam menyikapi problema kehidupan secara proporsional.

Sebagai lembaga pendidikan yang profesional, pada mulanya YAPI hanya mengacu pada pendidikan keagamaan murni, kemudian melangkah menjadi pendidikan terpadu. Pola pendidikan ini menyajikan program pesantren dan program umum dengan formulasi yang berimbang. Dengan demikian maka para santri akan lebih leluasa untuk menekuni disiplin ilmu yang mereka harapkan dengan tidak merasa khawatir akan kelanjutan pendidikan seusai mereka menyelesaikan studinya di YAPI. Dengan pertimbangan yang matang dan kajian yang dalam, maka YAPI pada tahun pelajaran 1997-1998 mengadakan perombakan program pendidikan. Yaitu membuka pendidikan *Takhasus* (Diniyah) yang mengedepankan kurikulum Pesantren, SMP/SMA yang menyajikan kurikulum Depdikbud. dan kurikulum Pesantren serta Taman Kanak-Kanak (TK-Plus) Al-Abrar.

2. Sekilas tentang Pernikahan Syī'ah Imāmiyah di YAPI Bangil

Allah menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan membuatnya merasa nyaman serta mempunyai perasaan mencintai terhadap lawan jenisnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan pernikahan agar hubungan antara kedua lawan jenis tersebut halal.

Secara umum, konsep pernikahan dalam mazhab Syī'ah Imāmiyah sama dengan mazhab lainnya. Namun, ada beberapa hal saja yang membedakan antara mazhab Syī'ah Imāmiyah dengan mazhab lainnya, seperti mazhab Syāfi'i, Ḥanafi, Ḥambali dan Māliki. Letak perbedaan itu di antaranya sebagai berikut:

- a. Dalam mazhab Syī'ah Imāmiyah terdapat nikah mut'ah atau munqaṭi'
 atau muajjal.
- b. Tidak wajib ada dua saksi dalam akas nikah.
- c. Dalam talak, wajib ada dua saksi laki-laki muslim yang adil.
- d. Wali bagi seorang wanita adalah ayah dan kakek dari ayah saja.

Di YAPI Bangil ini pernikahan juga dilaksanakan sebagaimana mazhab yang mereka anut. Hanya saja, sebagaimana yang terjadi di kalangan mereka tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur pernikahan orang yang mazhab Syī'ah Imāmiyah harus menikahi orang dari penganut mazhab tertentu atau pun keharusan untuk menikahi dengan orang semazhab. Perbedaan mazhab yang dianut oleh kedua pasangan yang akan menikah bukan menjadi penghalang mereka untuk membina rumah tangga.

Berdasar pemaparan sekilas di atas, menjadi jelas bahwa pernikahan di kalangan asatiż YAPI Bangil memiliki persamaan dan perbedaan dengan pernikahan yang diatur oleh mazhab Syafi'i, Maliki, Ḥanafi dan Ḥambali.

Penggunaan Rujukan Hukum oleh Asātiż YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah

Argumen akan menjadi semakin kuat dan tidak meragukan jika didasarkan pada rujukan yang tepat. Mengenai masalah rujukan hukum juga dipertimbangkan oleh asātiż YAPI dalam menjawab suatu permasalahan yang ada. Apalagi di zaman yang semakin maju, permasalahan agama yang muncul juga semakin tinggi.

Mengenai rujukan hukum yang dipakai oleh asātiż YAPI dalam memecahkan persoalan agama -saksi dalam pernikahan- mereka sebagai orang Syī'ah Imāmiyah harus bertaklid kepada imam yang menjadi marja'. Dalam hal ini mereka menganggap bahwa marāji' adalah orang yang secara keilmuan telah memenuhi syarat untuk berijtihad.

Oleh karena itu, rujukan hukum pertama yang digunakan asātiż YAPI dalam masalah saksi pernikahan adalah buku-buku fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang dianggap menurut mereka sudah layak untuk menduduki posisi mujtahid.³¹

Setidaknya ada tiga kitab fatwa yang dipakai oleh asātiż YAPI khususnya dan umumnya penganut mazhab Syī'ah Imāmiyah di Indonesia dalam masalah agama, yaitu:

- a. Taḥrir al-Wasilah karya Imam Khamayniy
- b. Al-'Urwatul Wusqā karya Muhammad Ṣādiq ar-Rūhaniy

³¹ Sirajuddin, *Wawancara*, 13 Juli 2011.

c. Ajwibah al-Istiftā'āt karya Ali al-Khāmaniiy

Untuk 'amaliyah sehari-hari maka asatiz YAPI Bangil merujuk pada salah satu kitab tersebut. Mereka tidak bisa langsung mengambil hukum dari kitab-kitab hadis sebelum imam marja merumuskannya.

4. Pandangan Asātiz YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah

Dari hasil penelitian tentang kedudukan saksi dalam pernikahan di YAPI Bangil, dapat diperoleh keterangan antara lain:

1) Ustāż Abdul Aziz Marzuqi

Di antara hal yang membedakan mazhab Sunnī dan Syī'ah Imāmiyah adalah dalam masalah saksi dalam pernikahan. Dalam mazhab Syī'ah Imāmiyah saksi dalam akad nikah hukumnya sunnah dan bukanlah suatu kewajiban. Manakala melakukan hal religi dalam mazhab kami dipermudah seperti pernikahan. Namun, dalam masalah talak diperketat dengan mendatangkan dua saksi sebagai keabsahan talak. Belia juga menambahkan kalau saksi haruslah orang laki-laki yang adil yaitu orang yang secara lahiriah tidak melakukan dosa besar dan tidak sering pula melakukan dosa kecil. 32

"Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya..."

³² Abdul Aziz Marzuqi, *Wawancara*, 13 Juli 2011.

Teks yang termaktub dalam kitab *Taḥrīr al-Wasīlah* tersebut di atas yang juga dijadikan beliau tentang tidak diwajibkannya saksi dalam pernikahan.

Secara praktis, *ustāż* yang sekaligus menjabat sebagai ketua pesantren ini mengakui bahwa pernikahan yang beliau laksanakan tetap menggunakan saksi dikarenakan mengikuti prosedur-prosedur yang diberlakukan pemerintah Indonesia dalam masalah pernikahan.

2) Ustāż Sirajuddin

Beliau mengatakan bahwa dalam mazhab Syī'ah Imāmiyah pernikahan itu dimudahkan. Misalnya, masalah saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah akad nikah. Ustāż lulusan Iran ini juga menambahkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi pun hukumnya sah. Beliau merujuk masalah tidak diwajibkannya saksi dalam akad nikah pada kitab Taḥrīr al-Wasīlah yang ditulis oleh Imam Khamayniy yaitu:

"Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya..."

Dari teks di atas dipahami bahwa menyaksikan akad nikah hukumnya sunnah. Beliau juga menambahkan bahwa meskipun dalam mazhab yang dianutnya tidak mewajibkan saksi dalam akad nikah, namun

dalam pelaksanaan ketika beliau menikah tetap menghadirkan saksi.

Bahkan saksi itu dihadirkan dari kedua belah pihak.³³

3) Ustāż Segaf

Ustāz yang telah mengajar di YAPI Bangil selama kurang lebih enam tahun ini menyatakan bahwa kesaksian dalam pernikahan bukan merupakan syarat sah, melainkan hanya sunah saja. Beliau juga menyatakan bahwa rujukan yang dijadikan dasar adalah kitab Taḥrīr al-Wasīlah yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa atau kitab yang dijadikan orang-orang Syī'ah dalam mengerjakan amal ibadah harian yaitu:

"Disunahkan menyaksikan akad dan mengumumkannya..."

Namun dalam ranah praktis, beliau juga menyatakan bahwa pernikahan yang beliau langsungkan tetap menghadirkan saksi karena mengikuti peraturan yang telah diterapkan pemerintah. Misalnya mulai dari pencatatan nikah dan melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi.³⁴

³³ Sirajuddin, Wawancara, 13 Juli 2011.

³⁴ Segaf, Wawancara, 19 Juli 2011

5. Pelaksanaan Kesaksian Pernikahan Syi'ah Imamiyah

Sebagai penganut mazhab Syī'ah Imāmiyah yang menyatakan bahwa saksi dalam pernikahan bukan merupakan kewajiban, namun dalam pelaksanaannya, rupanya mereka tetap menggunakan saksi.

Selain itu, dalam melakukan pernikahan mereka juga mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh negara. Misalnya saja dalam masalah pencatatan. Tentunya ketika pernikahan itu dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama), maka di situ pula akad nikah dilaksanakan di depan penghulu dan di hadapan saksi. Sebagaimana yang telah dituturkan *ustāż* Segaf yang melakukan pernikahannya di Malang.³⁵

Adapun ustāz Siraj yang melangsungkan pernikahannya di Qum, Iran tujuh tahun silam mengaku bahwa pernikahannya itu juga menggunakan saksi. Padahal kalau di lihat negara Iran merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah bermazhab Syi'ah. Saat itu beliau masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Qum. Tepatnya setelah dua tahun belajar di sana, beliau berkehendak untuk menikah dengan wanita asal Sumenep yang sama-sama menjadi mahasiswa di Iran. Demi mewujudkan kehendaknya untuk menikah beliau mengisi form yang di situ juga dicantumkan nama saksi. 36

³⁵ Ibid.

³⁶ Sirajuddin, *Wawancara*, 19 Juli 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI DALAM PERNIKAHAN *SYT'AH IMĀMIYAH* MENURUT PANDANGAN *ASĀTIŻ* YAPI BANGIL

A. Analisis terhadap Pandangan Asātiż YAPI Bangil tentang Saksi dalam Pernikahan Syī'ah Imāmiyah

Saksi merupakan salah satu alat bukti perdata dan pidana dalam hukum acara Islam. Keberadaan saksi menempati posisi penting yang menyangkut kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad. Di dalamnya juga terkandung hikmah yang besar demi ketertiban kehidupan di masyarakat luas.

Pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan menimbulkan prasangka buruk dari orang lain. Bahkan hal tersebut memicu kecurigaan atau tuduhan yang datang dari orang-orang sekitar terhadap pasangan tersebut. Mereka akan mengira kalau hubungan yang mereka lakukan adalah hubungan gelap (kumpul kebo), sehingga mungkin saja aparat keamanan akan terlibat dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, kedudukan saksi akan sangat menentukan untuk menjelaskan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan akad nikah.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan di BAB III, bahwasanya Syī'ah Imāmiyah berpendapat bahwa nikah tanpa saksi hukumnya sah. Itu artinya kedudukan saksi dalam pernikahan bagi mereka bukanlah menjadi suatu

kewajiban melainkan sunah. Alasan mereka adalah tidak adanya *naṣ* al-Qur'an yang menyebutkan wajibnya kehadiran saksi dalam pernikahan.

Selain itu, menurut ulama *Syī'ah* saksi dalam pernikahan bukanlah menjadi syarat sah nikah. Pendapat demikian juga diikuti oleh Ibnu Umar, Ibnu Zubair, 'Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun dan ahli *zāhir* yaitu Daud dan lainnya. Hal ini juga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Hamzah ibnā Umar.

Sependapat dengan mazhabnya, asātiż YAPI Bangil dalam memandang kedudukan saksi dalam pernikahan pun bukan menjadi syarat sah nikah. Menurut penulis, mereka lebih melihat pada para sahabat yang telah melakukan nikah tanpa saksi seperti Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar. Mereka menolak pendapat jumhūr ulama yang mengatakan saksi sebagai syarat sah nikah. Terlebih golongan Syī'ah Imāmiyah ini tidak menerima hadishadis yang sanadnya bukan dari ahli bait.

Hadis — Lā nikāḥa illā bi waliyyin wa syāhiday 'adlin- yang digunakan mayoritas ulama jika dilihat dari segi tata bahasa di sana terdapat Lā nāfī lil jinsi dalam lafaz لَا نِكَاحَ menunjukkan pada keabsahan (الصحة), sehingga artinya menjadi "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil". Maksudnya adalah mempersaksikan terjadinya akad nikah (ijab dan qabūl)

merupakan syarat sah nikah. Dengan demikian akad nikah yang tidak dipersaksikan, maka akad menjadi \overline{fasid} .

Oleh karena itu, di sini penulis kurang sepakat dengan pandangan asātiż yang tidak mempersyaratkan kehadiran saksi dalam pernikahan. Penulis lebih melihat maslahat ketika diwajibkan adanya keberadaan saksi sebagai syarat sah akad nikah. Tentunya, penulis lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan saksi dalam akad nikah untuk menjaga keabsahan keturunan seseorang dan tidak menimbulkan penyimpangan. Saksi juga dapat merahasiakan atau menyiarkan tentang telah terjadinya pernikahan di suatu tempat tergantung kehendak dari pesan kedua belah pihak yang berakad. Pada prinsipnya, saksi sebagai sesuatu yang penting dalam pandangan syara. Dengan adanya saksi akan memberikan kejelasan mengenai soal nafkah, menetapkan nasab, waris, menghindari subhat, prasangka buruk dari orang lain dan tentunya memberi kejelasan mana hubungan pernikahan yang sah dan zina.

Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sudah sewajarnya jika peristiwa sakral itu diberitahukan kepada sanak kerabat dan juga masyarakat sekitar. Bagaimanapun juga pernikahan sebagai momen bahagia kedua pasangan, alangkah baiknya jika dipersaksikan oleh dua orang saksi dan bahkan di hadapan orang banyak. Oleh karena itu Nabi juga menyunahkan untuk mengadakan walimah. Kemaslahatan saksi dalam akad nikah itu juga akan

¹ 'Alāuddīn Abī Bakar ibn Mas'ud al-Kasāni, *Badāi'u as-Ṣanāi' fī Tartīb as-Syarāi'*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.) 392.

kembali kepada pasangan yang telah menikah. Apabila ada kecurigaan atau tuduhan-tuduhan miring yang mengarah kepada mereka berdua, maka di sinilah saksi sebagai bukti yang akan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Lagi pula, di antara tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Oleh karena itu, dengan adanya dua orang sebagai saksi dalam pernikahan diupayakan suami tidak akan mengingkari buah hati mereka sendiri. Suami tidak bisa dengan mudah mengingkari istri, sebagaimana istri juga tidak dapat mengingkari suaminya, karena mereka dihadapkan pada dua orang saksi. Dengan demikian, terlahirlah anak keturunan yang sah di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini saksi berfungsi untuk memberi tahu atau informasi serta menjaga nasab anak dari hasil pernikahan yang sah.

Perihal pendapat yang tidak mengharuskan adanya saksi dalam akad nikah, berarti tidak mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan diadakannya hukum. Padahal tujuan ditetapkan hukum itu sendiri untuk kemaslahatan. Maslahat yang dimaksud adalah kemaslahatan hakiki yang tidak diiringi dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, maslahat yang hakiki itu menyangkut kepentingan umum bukan kepentingan pihak tertentu saja. Mereka lebih melihat kepada Nabi yang pernah melakukan nikah tanpa saksi dan beberapa sahabat seperti Ibnu al-Ḥasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim dan Ḥamzah ibnā Umar. Padahal hal tersebut merupakan sifat khuṣūsiyyah bagi Nabi.

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 548.

Selain itu, jika dilihat antara pandangan asātiż YAPI Bangil secara pribadi dan praktis terkesan munculnya inkonsistensi pendapat di antara mereka. Hal itu terjawab ketika asātiż YAPI Bangil berpandangan bahwa saksi dalam pernikahan hukumnya sunah, akan tetapi dalam tataran praktis mereka mengharuskan hadirnya minimal dua saksi dalam akad nikah.

Diakui atau tidak aturan yang dibuat pemerintah telah menggugurkan pandangan mereka yang memandang sunah saksi dalam pernikahan. Di Indonesia masalah saksi dalam pernikahan sudah mendapatkan perhatian yang cukup menarik. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Tidak hanya itu, saksi juga ikut menandatangani akta nikah. Hal ini juga sejalan dengan pasal 26 ayat 2 PMA (Peraturan Menteri Agama) RI No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi, "Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN."

Dengan demikian, dipahami bahwasanya saksi tidak hanya sekedar menyaksikan akad nikah saja, akan tetapi terlibat juga secara administratif sebagai alat bukti telah dilangsungkannya akad nikah di suatu tempat.

Saksi dapat dijadikan alat bukti untuk mengungkap kebenaran jika terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah ataupun

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Edisi Terbaru 2010), 440.

kecurigaan-kecurigaan dari pihak lain yang menyangsikan nikah tersebut di kemudian hari.

Dewasa ini, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pernikahan juga dilaksanakan di hadapan penghulu, di samping tetap menghadirkan dua orang saksi. Hal demikian diharapkan agar pernikahan itu benar-benar sah menurut agama juga menurut peraturan negara. Disadari atau tidak, jika hanya mengandalkan kepada dua saksi yang nantinya bisa dijadikan alat bukti, maka masalah pencatatan nikah juga menjadi penting. Karena kita tahu bahwa dimungkinkan saja saksi yang dibutuhkan itu rumahnya saling berjauhan atau pun sudah meninggal. Dengan adanya pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA (Kantor Urusan Agama), maka sebuah pernikahan pun akan mendapatkan legalisasi hukum yang kuat dengan akta nikah. Di sinilah letak maslahat dengan adanya pencatatan nikah.

Kehadiran saksi dalam akad nikah sangat urgen karena menyangkut kepentingan kerukunan rumah tangga, dan juga anak keturunan. Sehingga suami tidak akan mengingkari istri terlebih menyia-nyiakan anak keturunannya. Tidak kalah penting juga untuk menampik kecurigaan, prasangka buruk atau pun fitnah dari orang lain.

Dalam Islam juga dikenal dengan adanya *ḥifzun nasl*. Islam sangat menghargai dan menjaga agar kehormatan keturunan yang dilahirkan oleh seseorang. Anak yang dilahirkan harus dididik, dijaga dan diawasi. Oleh karena

itu masalah pernikahan juga membutuhkan lembaga pernikahan yang teratur demi meminimalkan terjadinya broken home. Selain itu agar tuduhan zina pun tidak melekat pada orang yang sejatinya sudah melangsungkan akad pernikahan.

Apabila pandangan asātiż YAPI Bangil ini diterapkan dalam kehidupan sekarang, tentu saja sudah tidak relevan. Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan gaya hidup manusia yang semakin modern, membuat segalanya membutuhkan kejelasan dan penyelesaian secara lembaga. Dikhawatirkan semakin banyak orang yang melakukan pernikahan dengan tanpa menggunakan saksi.

Dari pemaparan di atas, penulis kurang sepakat dengan pandangan asātiż YAPI Bangil karena pernikahan akan terus terjadi dari masa ke masa yang dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi. Untuk menghindari penyelewengan maupun pengingkaran, saksi memang diperlukan adanya. Kesaksian tidak hanya dilakukan dalam masalah muamalah seperti jual beli saja, akan tetapi dalam pernikahan saksi juga menempati posisi yang penting. Bagaimana pun juga saksi dapat memberikan keterangan atau pun kesaksiannya mengenai apa yang terjadi sebenarnya jika suatu saat timbul perselisihan ataupun kecurigaan.

⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 551.

B. Analisis terhadap Rujukan Hukum Asātiż YAPI Bangil tentang Saksi Pernikahan Syī'ah Imāmiyah

Masalah saksi dalam pernikahan, asātiż YAPI Bangil berpandangan bahwa saksi tidak menjadi syarat sah nikah. Saksi tidak lebih hanya untuk masalah yang berkaitan dengan waris, anak atau pun hudūd. Pendapat ini mereka sandarkan pada rujukan yang sahih menurut mazhab mereka.

Dalil dalam masalah saksi menurut mazhab Syi'ah Imamiyah adalah riwayat yang menceritakan bahwa Ja'far bin Sadiq pernah ditanya mengenai pernikahan tanpa saksi. Lalu beliau menjawab bahwa pernikahan seperti itu diperbolehkan. Lagi pula ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan pernikahan juga tidak ada satu pun yang menyebutkan kewajiban persaksian dalam pernikahan. Misalnya, surat an-Nisa' ayat 3, "Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi" 5 dan surat an-Nur ayat 32, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu" 6 dilaksanakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan kewajiban persaksian dalam akad nikah. Menurut ulama Syī'ah Imāmiyah hadis "Lā nikāha illā biwaliyyin wa syāhiday 'adlin" tidak kuat untuk membatasi ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Padahal, pendapat yang demikian dianggap pendapat yang lemah oleh jumhūr ulama

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 77. ⁶ Ibid., 354.

karena hadis-hadis yang menerangkan mempersaksikan nikah merupakan hadis yang *masyhūr* (populer).⁷

Rujukan hukum yang dipakai oleh mereka adalah kitab fatwa yang ditulis oleh Imam Khamayniy. Sementara bagi pengikut Syī'ah Imāmiyah bertaklid kepada imam merupakan suatu keharusan. Selama Imam al-Mahdi belum keluar, maka bagi orang-orang Syi'ah Imāmiyah merujuk segala urusan agama kepada ulama marāji' yang dianggap mampu untuk berijtihad mengeluarkan fatwa-fatwa seiring dengan persoalan baru yang semakin berkembang.

Pada dasarnya orang yang memberikan fatwa itu hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan *mufti* atau orang yang ahli fikih berusaha mencari jawabannya. Jika ditelusuri lebih lanjut, ketika Imam Khamayniy berfatwa bahwa saksi dalam pernikahan adalah sunah, maka hal itu ditemukan dalam hadis yang dipakai mereka, yaitu ketika Imam Ja'far aṣ-Ṣādiq ditanya mengenai seseorang yang menikah tanpa saksi. Saat itu beliau memang tidak mempermasalahkan menikah yang demikian.

Fatwa yang baik dari seorang mujtahid adalah mengetahui secara persis apa yang dimintakan fatwa, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat lingkungannya agar diketahui mana yang lebih besar dampak negatif

Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6560-6561.

atau buruknya. Hal seperti ini hendaknya dilakukan oleh seorang mujtahid/muft7.8

Menurut penulis, fatwa itu hanya berlaku bagi orang yang meminta fatwa tersebut. Jadi, jika dikembalikan kepada asātiż YAPI yang tinggal di Indonesia, maka fatwa imam Khamayniy tersebut tidak cocok. Apalagi di Indonesia juga mempunyai aturan tersenderi mengenai pernikahan, di antaranya apa yang tertuang dalam KHI.

Selain itu perselisihan pendapat tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam memaknai sunnah. Sunnah yang diterima Syī'ah Imāmiyah adalah sunnah yang diriwayatkan oleh ahli bait saja. Sedang hadis yang biasa dipakai ulama adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi SAW. Jika dilihat hadis yang dipakai asātiż YAPI hanya sampai kepada imam mereka saja yaitu Ja'far bin Ṣādiq. Sedangkan hadis yang dipakai jumhūr ulama merupakan hadis riwayat sahabat yaitu Ibnu 'Abbās dan 'Āisyah.

Mengenai ayat al-Qur'an yang masih global, maka hadis inilah yang berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya masalah pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an yang tidak diatur secara rinci, seperti perintah walimah, wali atau pun saksi. Jadi, mengenai tata cara pernikahan ini memang ditemui dalam hadis-hadis.

⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 595.

C. Analisis terhadap Pelaksanaan Kedudukan Saksi Pernikahan Asātiż YAPI Bangil

Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan di kalangan asātiż YAPI Bangil, sebagaimana yang telah terjadi adalah tetap menggunakan saksi. Artinya, walaupun dalam pandangan mereka kehadiran saksi dalam akad pernikahan bukanlah suatu kewajiban, namun dalam kenyataannya mereka tetap menghadirkan saksi ketika melangsungkan akad nikah.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu segala hal yang bertalian dengan masalah keagamaan ini juga ikut mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 negara ini menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya diatur mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Secara gamblang mengenai masalah saksi nikah diuraikan dalam beberapa pasal di Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.

Pasal 26: Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

Dari pasal-pasal di atas dipahami bahwa dalam KHI, saksi dalam pernikahan dimasukkan dalam rukun pelaksanaan akad nikah. Di mana ijab dan qabūl itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini mengindikasikan bahwa ulama di Indonesia memberi perhatian terhadap masalah saksi nikah sebagai hal yang harus ada ketika ijab dan qabūl dilangsungkan. Saksi dalam akad nikah menduduki posisi penting yang mana di balik itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan kedua pasangan yang menikah.

Asātiz yang bermazhab Syi'ah Imāmiyah di YAPI Bangil ini dalam melaksanakan pernikahan juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam masalah pencatatan pernikahan di KUA. Oleh karena itu, akad nikah itu juga dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat.

Menanggapi praktek pelaksanaan pernikahan yang menggunakan saksi maka hal itu tidak bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Mereka sepakat dengan pernikahan yang demikian, karena saksi dalam pernikahan merupakan syarat sah akad nikah. Di antara dalil yang digunakan mayoritas ulama adalah hadis 'Āisyah:

نَا أَبُوْ ذَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْن بْن عِبَاد النَّسَائِيْ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بْن سِنَان نَا أَبِيْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. 9

Artinya: "Abū Żar Ahmad bin Muhammad bin Abī Bakr menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al-Husayn bin 'Ibād an-Nasāiy menceritakan,

⁹ Ali bin Umar ad-Dār Quṭni, Sunan ad-Dār Quṭni, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 138.

Muhammad bin Yazid bin Sinan menceritakan, bahwasanya bapakku menceritakan dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."

Adapun jika melihat pendapat mazhab *Syī'ah Imāmiyah* yang mengatakan saksi dalam pernikahan hanyalah sunah, maka bagi *asātiż* YAPI Bangil telah mengerjakan hal sunah menurut mazhab mereka. Di mana menghadirkan saksi dalam pernikahan bukanlah hal yang ketat. Jika melaksanakan pernikahan menghadirkan saksi, maka akan mendapatkan pahala sunah. Sebaliknya, jika pernikahan itu tidak dihadiri saksi maka bila ditinjau dari mazhab *Syī'ah Imāmiyah* hal tersebut tidak berkonsekuensi apa-apa terhadap keabsahan nikah.

Mereka mengikuti apa yang telah dilaksanakan para imamnya. Di mana Ja'far aṣ-Ṣādiq pernah ditanya mengenai pernikahan yang tidak menggunakan saksi, maka menurut beliau tidak apa-apa. Dan sebagaimana diketahui pula, orang-orang Syī'ah hanya menerima hadis yang sanadnya dari ahli bait saja.

Menurut penulis, selama pernikahan itu telah terpenuhi syarat dan rukunnya dalam arti terdapat wali, calon suami, calon istri dan saksi yang terdiri dari dua orang dan telah tercukupi semua syarat dan rukunnya, maka pernikahannya sah. Apalagi di Indonesia ini ditambah dengan dilaksanakannya akad nikah di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dari KUA untuk melakukan pencatatan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap peristiwa

pernikahan oleh warganya, maka praktek pernikahan yang demikian sah menurut agama dan juga peraturan perundangan yang ada.

Pelaksanaan pernikahan yang demikian akan membawa kemaslahatan bagi kedua mempelai, karena suatu saat mampu untuk membuktikan keabsahan pernikahannya baik di mata agama maupun di mata hukum negara karena ia bisa menunjukkan saksi sebagai alat bukti telah dilangsungkannya akad nikah dan bukti tertulis akta nikah yang dikeluarkan lembaga negara yang berwenang yakni KUA di wilayah kecamatan di mana peristiwa pernikahan itu dilaksanakan.

Perihal kedudukan saksi dalam mazhab Syī'ah Imāmiyah bukan menjadi penentu keabsahan nikah, tapi melihat kondisi zaman sekarang yang semakin maju maka perlulah kiranya peristiwa sesakral pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi dan diberitahukan ke khalayak umum.

Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh asātiż YAPI Bangil. Hal yang memotivasi mereka dalam menghadirkan saksi dalam akad nikah karena semua itu tidak terlepas dari hikmah yang ada di balik kesaksian pernikahan.

Kiranya akan mudah jika pernikahan itu dihadiri oleh dua orang saksi. Hal itu akan terlihat bilamana muncul kecurigaan, prasangka buruk yang datang dari masyarakat. Di saat seperti inilah kedua saksi akan tampil sebagai alat bukti dalam menjelaskan dengan sebenarnya apa yang telah terjadi. Setelah kedua saksi itu menjelaskan semua yang diketahui, diharapkan tudingantudingan negatif yang mengarah kepada kedua pasangan yang telah menikah ini

akan menjadi reda dan masyarakat akan percaya bahwa kebersamaan kedua pasangan itu memang telah sah dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci.

Selain itu, keberadaan saksi juga untuk mengantisipasi apabila terjadi pengingkaran dari salah satu pasangan tersebut. Apalagi kalau sudah menyangkut anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah masalah warisan.

Jadi, menurut penulis apa yang telah dilaksanakan oleh asātiż di YAPI itu sudah tepat. Meskipun kedudukan saksi dalam mazhab mereka adalah sunah, namun dalam pelaksanaan di kehidupan nyata mereka tetap melaksanakan pernikahan dengan dihadiri para saksi. Hal ini dilakukan karena mereka mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul dari disaksikannya akad nikah bagi kedua pasangan.

Bertolak dari penjelasan di atas, penulis juga berpendapat bahwa asātiż di YAPI tidak menganggap enteng sebuah pernikahan yang bisa dilakukan dengan seenaknya tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan *asātiż* YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan *Syī'ah Imāmiyah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Asātiż YAPI Bangil memandang kedudukan saksi dalam pernikahan bukan suatu kewajiban, melainkan sunah. Jadi, menurut mereka saksi bukan menjadi syarat sah akad nikah.
- 2. Rujukan hukum yang digunakan oleh asātiż YAPI Bangil tentang saksi dalam pernikahan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Khamayniy yang termaktub dalam kitab Taḥrīr al-Wasīlah.
- 3. Pandangan asātiż YAPI Bangil terhadap saksi dalam pernikahan tidak sejalan dengan hukum Islam karena ditemukan beberapa hadis yang menerangkan keharusan hadirnya saksi dalam pernikahan. Terlepas dari pandangan mereka tersebut, dalam prakteknya mereka tetap menghadirkan minimal dua saksi dalam akad pernikahan yang mereka langsungkan.

B. Saran

Berikut ini saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak:

- Kepada para penganut mazhab Syī'ah Imāmiyah, seyogianya tetap menghadirkan dua saksi dalam pernikahan meskipun bagi mereka saksi bukan syarat sah pernikahan. Mengingat banyaknya hikmah yang terdapat dalam menyaksikan akad nikah.
- 2. Bagi pembaca diharapkan tidak meremehkan masalah persaksian dalam pernikahan, sebab persaksian ini telah diatur dalam hukum Islam (baca: hadis). Di Indonesia pun masalah saksi dalam pernikahan diatur secara gamblang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghazaly, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003
- Abū al-Qāsim Najm ad-Dīn Ja'far bin Ḥasan al-Ḥali, Al-Mukhtaṣar an-Nāfi' fī Fiqh al-Imāmiyah, t.p., t.t.
- Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi al-Andalusiy, *Bidāyatul Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, Mesir: al-Azhar, 1992
- Ali bin Umar ad-Dār Quṭni, Sunan ad-Dār Quṭni, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1994
- Ali Yusuf as-Subkiy, Nizāmul Usrah fī al-Islām, Penerjemah: Nur Khazin, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Bukhāri, Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 2000
- H. Miftahul Huda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dāri Perkawinan Sirri", Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam, No. 4, Juli, 2009
- Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran, Bandung: Mizan, 1998
- Al-Jazīrī, Abdurrahman, Al fīqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1996
- al-Kasāni, 'Alāuddīn Abi Bakar ibn Mas'ud Badāi'u as-Ṣanāi' fī Tartīb as-Syarāi',
 Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- al-Kulaiyniy, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qūb bin Ishāq ar-Rāzi, Al-Kāfī, Juz 5, t.p., t.t.
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- -----, Perbandingan Mazhab, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2007

M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Malik, al-Muwatta, Muassasah Zayid bin Sultan Ali Nahyan, 2004

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009

Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung: Mizan, 2002

Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Nailul Auṭār, Juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995

Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Khamsah, Penerjemah Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2010

Muslim Fathoni, Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994

Muslim Ibrahim, Pengantar Figh Muqaaran, Jakarta: Erlangga, 1991, 107.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana, 2006

Sayyid Sābiq, Figh as-Sunnah, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2006

Syafiq Hasyim, Hal-Hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam, Bandung: Mizan, 2001

Asy-Syahrastani, Al-Milal wa al-Nihal, Penerjemah: Asywadie Syukur, Al-Milal wa al-Nihal Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Islam, buku I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006

Syamsuddin as-Sarkhasiy, Al-Mabsūt, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t

Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al Ḥusaiyniy, *Kifayah al-Akhyār*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Tirmiżi, Sunan at-Tirmiżi, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2005

Wahbah az-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Perkawinan (Edisi Terbaru 2010)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 2001